



Article Informations
Corresponding Email:
lutfiabdullahsetiawan@gm.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

PERUBAHAN STRATEGI KEAMANAN ISRAEL DI TIMUR TENGAH PASCA SERANGAN HAMAS PADA 7 OKTOBER 2023

Lutfi Abdullah Setiawan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas perubahan strategi keamanan Israel di Timur Tengah Pasca Serangan Hamas 7 Oktober 2023. Konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 berkembang menjadi eskalasi regional. Situasi ini mengubah lanskap geopolitik kawasan, mengganggu proses normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab, dan memperkuat peran Iran beserta proksinya sehingga membuat Israel melakukan perubahan dalam strategi keamanannya kepada pendekatan militer. Penelitian ini mengkaji mengapa strategi keamanan Israel berubah pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik dengan konsep kepentingan nasional dan persepsi ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan strategi keamanan Israel dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu tekanan di lingkungan regional akibat dari gerakan poros perlawanan, serta faktor internal yaitu opini publik Israel terhadap ancaman regional, namun faktor-faktor tersebut dimediasi terlebih dahulu oleh persepsi Benjamin Netanyahu sehingga akhirnya menghasilkan perubahan strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah.

Kata Kunci: Konflik Israel-Palestina, Strategi Keamanan, Timur Tengah

Abstract

This study examines the changes in Israel's security strategy in the Middle East following the Hamas attack on October 7, 2023. The conflict triggered by the Hamas attack on October 7, 2023, escalated into a regional escalation. This situation changed the geopolitical landscape of the region, disrupted the process of normalizing Israel's relations with Arab countries, and strengthened the role of Iran and its proxies, forcing Israel to change its security strategy, including its military approach. This study examines why Israel's security strategy changed after the Hamas attack on October 7,

2023. This study uses neoclassical realism theory with the concepts of national interest and threat perception. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through library research that included official documents, government reports, and academic literature. The analysis was conducted by looking at the factors that influenced changes in Israel's security strategy in the Middle East region after the Hamas attack on October 7, 2023. This study concluded that changes in Israel's security strategy were influenced by external factors, specifically pressure in the regional environment due to the resistance axis movement, as well as internal factors, specifically Israeli public opinion regarding regional threat factors, however, these factors were mediated first by Benjamin Netanyahu's perception, which ultimately resulted in changes in Israel's security strategy in the Middle East region.

Keywords: Israeli-Palestinian Conflict, Security Strategy, Middle East

1. PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina menjadi salah satu isu sentral di kawasan Timur Tengah yang menarik untuk diteliti. Konflik tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas kawasan dan hubungan antara negara-negara di Timur Tengah. Konflik antara keduanya juga menjadi fokus masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Sejak Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada tahun 2009, ia mengadopsi strategi mempertahankan status quo, dengan membekukan proses negosiasi, mengendalikan Otoritas Palestina, dan menerapkan kebijakan "manajemen konflik", dimana kebijakan Israel terhadap Palestina dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu cenderung mempertahankan status quo, yang ditandai dengan absennya inisiatif diplomatik baru serta pendekatan dominan berbasis keamanan dan militer. Kondisi tersebut bertahan hingga periode 2020-2023.

Israel melalui strategi keamanannya kemudian mendorong proses normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab melalui perjanjian Abraham Accords pada tahun 2020 dengan mediasi Amerika Serikat, yang berfokus pada kerjasama keamanan dalam dinamika regional, dan keinginan untuk mengimbangi intervensi Iran dan mengendalikan ancaman keamanan di perbatasan Israel. Upaya tersebut juga menjadi strategi Israel untuk melemahkan posisi diplomatik Hamas dan "Poros Perlawanan" di kawasan. Pendekatan ini secara implisit bertujuan memperoleh legitimasi terhadap kondisi status quo, termasuk keberlanjutan pembangunan permukiman di

Tepi Barat dan ketiadaan prospek nyata terhadap kedaulatan yang utuh bagi rakyat Palestina.

Puncaknya pada 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan mengejutkan melalui darat, udara, dan laut ke Israel, serta menembakan ribuan roket untuk menghancurkan instalasi militer dan mengambil alih banyak permukiman untuk sementara waktu. Serangan tersebut menyebabkan 1.200 orang tewas di kalangan warga Israel dan juga penyanderaan terhadap ratusan warga Israel ke Jalur Gaza. Israel kemudian menanggapi serangan Hamas tersebut dengan mendeklarasikan perang sebagai upaya untuk mengembalikan strategi deterrence Israel melalui operasi “Iron Swords” yang menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza. Sedangkan di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut hingga akhir tahun 2023. Menurut pemerintah Israel, tujuan operasi tersebut adalah untuk menghancurkan secara total pemerintahan dan kemampuan militer Hamas.

Meningkatnya konflik Israel-Hamas tersebut telah berdampak signifikan terhadap hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab. Eskalasi konflik yang sedang berlangsung telah menyoroti keterbatasan hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui perjanjian Abraham Accords dalam mencapai stabilitas regional tanpa mengatasi isu-isu inti dari konflik Israel-Palestina. Secara keseluruhan, sementara Perjanjian Abraham telah membuka jalan baru untuk kerjasama strategis Israel dengan negara-negara Arab, eskalasi konflik Israel-Hamas di Gaza telah menimbulkan tantangan bagi perjanjian tersebut.

Selain berdampak terhadap strategi normalisasi Israel dengan negara-negara Arab, konflik Israel-Hamas juga mempengaruhi kondisi stabilitas kawasan setelah meningkatnya konflik Israel dengan “Poros Perlawanan” terutama Iran dan Hizbullah. Pemerintah Israel menuding keterlibatan Iran dalam serangan tersebut, dalam pembukaan Sidang Musim Dingin Sidang Kedua Knesset ke-25 pada Oktober 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam siaran persnya, “Hamas adalah bagian dari poros kejahatan Iran, Hizbullah, dan antek-anteknya yang harus di berantas”.

Eskalasi konflik kemudian semakin meluas ketika Hizbullah, sekutu terkuat Iran, segera membuka front kedua setelah Hamas menyerang. Kelompok ini meluncurkan rudal, roket, dan serangan drone dari selatan Lebanon ke utara Israel. Israel menanggapi dengan bombardir artileri dan serangan udara skala besar ke kamp-kamp dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon selatan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemampuan militer Hizbullah agar tidak menjadi ancaman langsung bagi warga Israel utara di tengah perang Israel-Hamas.

Selain itu Israel juga melancarkan serangan terhadap gedung Konsuler Kedutaan Besar Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024. Serangan tersebut menewaskan 16 orang, termasuk tokoh penting Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi, bersama perwira tinggi lainnya, Brigadir Jenderal Mohammad Hadi Haji Rahimi. Tindakan ini banyak dikaitkan dengan peran Iran dalam memberikan dukungan kepada Hamas. Sebagai respons, Iran kemudian melakukan serangan balasan dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal yang diarahkan ke wilayah Israel.

Eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas pada akhirnya tidak hanya menjadi konflik dua pihak saja, namun juga melibatkan pihak-pihak lain di kawasan, seperti Iran, Suriah dan Hizbullah di Lebanon. Keterlibatan aktor-aktor tersebut memperluas dimensi konflik menjadi isu regional yang berimplikasi langsung terhadap keamanan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik Israel-Hamas tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan strategi keamanan negara-negara di sekitarnya, yang pada gilirannya mendorong Israel untuk melakukan penyesuaian dalam strategi keamanannya di kawasan.

Melihat kompleksitas dinamika tersebut, penting untuk meneliti mengapa strategi keamanan Israel di Timur Tengah berubah pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik sebagai kajian hubungan internasional, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk memahami strategi kebijakan keamanan suatu aktor dalam lingkungan regional yang kompetitif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023. Dengan menggunakan teori realisme neoklasik dengan konsep kepentingan nasional dan persepsi ancaman.

2. PEMBAHASAN

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menandai titik balik penting dalam dinamika keamanan Israel sekaligus menimbulkan guncangan besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Peristiwa tersebut bukan hanya mencerminkan kegagalan intelijen dan strategi pencegahan Israel yang selama ini mengandalkan paradigma deterrence, tetapi juga memaksa Israel untuk melakukan penyesuaian strategis yang lebih luas dalam kerangka kebijakan keamanannya. Perubahan strategi ini terlihat dari peningkatan skala operasi militer, perluasan target kepada “Poros Perlawanan” dan negara pendukung Hamas, serta intensifikasi koordinasi dengan mitra strategis, terutama Amerika Serikat.

Untuk dapat menganalisis lebih dalam mengapa strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah berubah pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Peneliti menggunakan pendekatan realisme neoklasik menurut Gideon Rose. Dalam realisme neoklasik, kebijakan politik suatu negara dipengaruhi oleh posisinya dalam sistem internasional, yang secara khusus ditentukan oleh relative power yang dimiliki negara tersebut, namun pengaruh kekuatan tersebut terhadap politik luar negeri tidak bersifat langsung dan sederhana, karena terdapat tekanan dari sistem internasional perlu terlebih dahulu dimediasi oleh faktor-faktor di tingkat domestik, seperti persepsi para

pengambil keputusan serta struktur institusi pemerintahan. Maka dari itu dalam melakukan analisis mengenai perubahan strategi keamanan Israel di Timur Tengah, peneliti melakukan analisis di multi level yaitu tekanan eksternal, posisi Israel di kawasan, serta persepsi pengambil keputusan di lingkungan domestik.

Tekanan di Lingkungan Eksternal

Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 tidak hanya memicu eskalasi besar di Gaza, tetapi juga membuka dimensi baru dalam strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah. Dalam kerangka realisme neoklasik, kebijakan Israel pasca serangan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor struktural di level internasional dan regional. Secara struktural, Israel memandang Iran sebagai aktor utama yang menopang jaringan perlawanan regional melalui dukungannya terhadap Hamas, Hizbullah, dan kelompok Jihad Islam Palestina. Bagi Israel, konflik dengan Hamas hanyalah salah satu "tentakel" dari strategi proksi Iran.

Oleh karena itu, perluasan operasi militer Israel terhadap target-target Iran pasca 7 Oktober 2023 tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Israel untuk menekan dan melemahkan pengaruh Teheran di kawasan. Hal ini tampak jelas dalam serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada April 2024 serta serangan terbatas ke fasilitas militer Iran pada Oktober 2024. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan Hamas, langkah tersebut merupakan upaya Israel untuk mengirimkan sinyal deterrence (pencegahan) kepada Iran sekaligus memperluas arena konfrontasi ke pusat dukungan Hamas.

Eskalasi Konflik Israel-Iran

Kepemimpinan Iran telah berusaha untuk menjauhkan dirinya dari tuduhan keterlibatan langsung dalam serangan 7 Oktober 2023, namun Iran kemudian menunjukkan apresiasinya terhadap serangan tersebut, dimana sejak serangan tersebut, Iran telah vokal memperingatkan tentang konsekuensi regional dari kampanye Israel yang meningkat di Gaza. Iran sendiri telah memberikan dukungannya sejak lama terhadap kelompok tersebut.

Bagi Iran, krisis ini membuka ruang strategis yang menguntungkan. Teheran melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk menekan Israel, terutama dengan munculnya kritik dari sejumlah negara Arab yang sebelumnya tengah mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv, lawan utama Iran di kawasan. Iran menekankan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober menunjukkan kerentanan Israel, sekaligus memanfaatkan situasi ini untuk mengecam keterlibatan Amerika Serikat yang dinilai memperburuk konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, Iran berusaha mempertegas narasi yang dapat memperlemah posisi Israel sekaligus memperdalam penurunan reputasi Amerika Serikat di Timur Tengah.

Secara paradoks, Teheran mungkin melihat serangan ini, diiringi dengan retorika dari tokoh politik dan militer Iran yang mengancam akan meningkatkan ketegangan jika Israel terus melakukan langkah saat ini, sebagai upaya untuk mengelola risiko konflik. Dengan kata lain, Iran dan sekutunya mungkin sedang berusaha untuk mencegah Israel dan sekutunya melakukan kampanye yang lebih luas di Gaza atau Libanon yang dapat

melibatkan aktor regional lainnya, yang berpotensi melibatkan Iran yang merugikan Israel.

Dalam konteks ini, eskalasi konflik antara Israel-Hamas menghadirkan dilema bagi Teheran; jika ia tidak campur tangan untuk mencegah kehancuran Hamas, ia berisiko kehilangan kredibilitas di mata sekutu-sekutunya. Namun, jika ia mendorong Hizbullah atau mitra regional lainnya untuk campur tangan dengan lebih tegas, itu bisa mendorong Israel, dengan dukungan AS, untuk secara signifikan merusak kemampuan Hizbullah. Selama hampir empat dekade, kebijakan pertahanan maju Iran telah mencegah para penyerang potensial dengan memproyeksikan kekuatan melalui sekutu-sekutunya di seluruh wilayah tersebut. Konflik di Gaza mendorong batasan kebijakan tersebut dengan berpotensi melibatkan Teheran secara langsung dalam keterlibatan yang telah berusaha dihindarinya.

Pilihan untuk kembali pada status quo atau meningkatkan eskalasi justru memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Hizbullah dan Teheran dibandingkan bagi Israel. Jika Israel memilih kembali ke status quo, hal itu berpotensi dipersepsikan sebagai sebuah kekalahan bagi Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang pada gilirannya akan mengurangi dorongan untuk memberikan konsesi yang lebih luas selain sekadar jeda pertempuran. Demi menghindari kesan kekalahan tersebut, Israel terdorong untuk mengambil langkah eskalasi, meskipun potensi manfaat yang diperoleh tidak selalu sepadan dengan besarnya risiko yang dihadapi.

Bagi Israel, jalan keluar dari jebakan eskalasi tanpa adanya penyelesaian politik atas konflik hanya dapat ditempuh dengan membangun

ancaman yang nyata dan meyakinkan. Ancaman ini diharapkan mampu mencegah serangan Hamas di kemudian hari sekaligus menghalangi dukungan dari Hizbullah maupun Teheran yang memungkinkan Hamas melancarkan serangan tersebut. Faktor eksternal inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi Israel untuk menyesuaikan strategi keamanannya di kawasan.

Kekuatan Relatif Israel di Kawasan Timur Tengah

Dalam perspektif realisme neoklasik, perubahan di lingkungan eksternal menjadi salah satu faktor penting menyangkut perubahan struktur, yang secara khusus ditentukan oleh relative power (kekuatan relatif negara dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan). Pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan serangan balasan Israel di Gaza, kondisi tersebut menyebabkan perubahan dalam distribusi kekuatan di Timur Tengah.

Sebelumnya, dinamika politik di kawasan berada dalam polaritas antara Israel dan Iran, dimana Israel melakukan kerjasama keamanan melalui Abraham Accords dengan negara-negara Teluk, dan Iran dengan Proksi “Poros Perlawanan” di Palestina, Lebanon, Irak dan Suriah. Namun setelah eskalasi konflik Israel-Hamas pada tahun 2023, beberapa negara-negara Arab menghentikan sementara proses normalisasi dengan Israel dalam upaya solidaritas terhadap krisis kemanusiaan di Gaza sehingga meningkatkan tekanan politik Israel di Kawasan. Disisi lain Poros Perlawanan mengalami penurunan kekuatan akibat kerusakan signifikan Hamas dan Hizbullah akibat serangan balasan Israel.

Walaupun proses normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab Teluk menghadapi hambatan sehingga membuat posisi politik Israel di kawasan melemah, secara kekuatan material relatif, Israel masih menempati posisi teratas di kawasan dalam tiga aspek utama: tingkat pengeluaran pertahanan, kekuatan militer berteknologi tinggi, termasuk kemampuan udara dan sistem pertahanan antirudal, serta dukungan eksternal, khususnya dari Amerika Serikat, yang memastikan terjaganya Qualitative Military Edge (QME). Namun, konflik yang berkepanjangan membawa dampak signifikan berupa beban ekonomi dan tekanan terhadap kesiapan pasukan cadangan, sehingga persoalan ketahanan (sustainment) muncul sebagai tantangan utama setelah fase eskalasi.

Faktor Internal

Pengaruh kekuatan dan tekanan di lingkungan eksternal terhadap perubahan strategi keamanan Israel tidak bersifat langsung dan sederhana, karena perlu terlebih dahulu dimediasi oleh faktor-faktor di tingkat domestik, dalam hal ini peneliti menilai dari opini publik Israel terhadap keamanan serta persepsi pemimpin Israel terhadap ancaman.

Opini Publik Israel

Pada tahap awal perang (Oktober–November 2023), survei War in Gaza yang dilakukan oleh Israel Democracy Institute (IDI) memperlihatkan dukungan besar, khususnya dari masyarakat Yahudi Israel, terhadap dua sasaran utama: menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera. Meski demikian, sejak awal mayoritas responden meragukan bahwa pemerintah memiliki strategi jelas terkait kondisi “Day After” perang. Situasi ini mencerminkan perpaduan yang khas antara keyakinan pada

operasi militer dan keraguan terhadap arah kebijakan pascakonflik. Pembentukan negara Palestina juga kemudian ditentang oleh koalisi sayap kanan Netanyahu, yang berupaya memperluas kendali Israel atas Gaza dan Tepi Barat. Terdapat banyak ketidakpuasan dalam masyarakat Israel atas reformasi peradilan dan ketidakpuasan di antara warga Israel terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu sebelum serangan Hamas. Hamas dan para pelaku regional lainnya percaya bahwa perpecahan politik dalam masyarakat Israel melemahkan mereka dan menciptakan lingkungan sehingga mendukung serangan. Tujuan Hamas dalam serangan itu adalah untuk mengembalikan isu Palestina ke dalam agenda internasional.

Dalam situasi perang yang masih berlangsung, hasil survei pasca-serangan 7 Oktober menunjukkan penurunan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina, dari 35% menjadi 26%. Sebanyak 40% responden, termasuk setengah dari populasi Yahudi Israel, menyatakan bahwa Israel sebaiknya mengambil alih pemerintahan di Gaza. Secara umum, mayoritas masyarakat Israel menilai bahwa pendirian negara Palestina tidak lagi menjadi opsi yang realistis dalam kerangka negosiasi. Pasca eskalasi 2023, hanya 13% warga Israel yang masih meyakini adanya peluang perdamaian dengan Palestina.

Memasuki tahun 2024, survei terbaru IDI menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Israel masih mendukung tujuan perang, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik utama justru mengalami pelemahan. Laporan Israeli Democracy Index 2024 mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik tetap stagnan, mencerminkan jarak yang konsisten antara

masyarakat dan pemerintah sepanjang tahun. Namun, di sisi lain, kepercayaan publik terhadap IDF justru mengalami peningkatan signifikan, naik dari 69% menjadi 77% pada Oktober 2024, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat Israel mengenai potensi pecahnya perang multi-front berskala besar.

Posisi politik Netanyahu sendiri juga lemah sebelum perang, dengan banyak warga Israel yang geram dengan tuduhan korupsi dan upaya pemerintah sayap kanannya untuk melemahkan sistem peradilan dan memaksakan reformasi sayap kanan lainnya. Beberapa warga Israel menyalahkan Netanyahu karena tidak bertanggung jawab atas kegagalan strategis yang tercermin dalam peristiwa 7 Oktober.

Persepsi Ancaman Terhadap Poros Perlawanan

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 mengubah secara dramatis cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memandang ancaman regional. Dalam pembukaan Sidang Musim Dingin, Sidang Kedua Knesset ke-25 pada Oktober 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam siaran persnya, “Hamas adalah bagian dari poros kejahatan Iran, Hizbullah, dan antek-anteknya.” Netanyahu menegaskan bahwa Hamas adalah sekutu Iran, Hizbullah, dan sekutu lainnya yang dianggap sebagai organisasi teroris yang harus diberantas.

Persepsi mengenai ancaman Benjamin Netanyahu memengaruhi pandangannya terhadap interaksi antara struktur sistem internasional (ketegangan hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan meningkatnya ancaman langsung Iran serta poros perlawanan) dan dinamika politik domestik (misalnya opini publik Israel terhadap pemerintah). Setelah

gempuran Hamas 7 Oktober 2023, struktur ancaman baru muncul: Israel kini dikelilingi oleh aktor-aktor yang semakin koordinatif (Hamas, Hizbullah, Iran, Houthi, milisi Irak). Secara bersamaan, tekanan domestik di Israel seperti ketakutan publik pasca-teror, tuntutan koalisi pemerintahan, dan politik keamanan dalam negeri, memperkuat sikap Netanyahu yang agresif.

Dalam kerangka persepsi ancaman, Netanyahu menilai niat dan kemampuan lawan (seperti kemampuan Hamas dan poros perlawanan melakukan serangan) lebih mengancam daripada perkiraan awal. Israel menyesuaikan strategi militernya dengan ancaman multi-front baru ini, menggelar pasukan di Gaza dan Lebanon, memperluas operasi ke Yaman dan Suriah, serta mengintensifkan tekanan diplomatik bersama Amerika Serikat. Iran tetap dipandang sebagai ancaman utama di balik konflik.

Sebagai pelindung ideologis dan logistik Hamas dan Hizbullah, serta peneliti nuklir, rezim Teheran berada di pusat perhatian Netanyahu. Analisis INS (Insight Turkey) menyatakan bahwa semenjak beberapa dekade lalu, Iran telah dianggap musuh paling berbahaya bagi Israel. Setelah 7 Oktober, Netanyahu kerap menghubungkan serangan dengan kontribusi Iran, ia menyebut perlunya menghentikan “poros perlawanan” yang dipimpin oleh Iran dan militan pendukungnya di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman.

Dalam praktiknya, Israel memperluas konflik langsung ke wilayah Iran. Netanyahu secara terbuka menargetkan kepemimpinan Iran, ia menyatakan mimpinya bahwa rakyat Persia akan “segera bebas dari para tiran” dan memperingatkan “tak ada tempat di Timur Tengah yang tak dapat dijangkau Israel”. Israel melancarkan serangan siber, pembunuhan di Suriah–Lebanon, hingga menghantam fasilitas militer Iran (seperti radar

pertahanan di Isfahan) sebagai pesan kekuatan. Analisis IISS (International Institute for Strategic Studies) menggarisbawahi dilema Iran sebagai propaganda “Poros Perlawanan” yang terganggu karena Hamas, Hizbullah, dan Houthi mengikuti agenda lokal mereka sendiri daripada instruksi Teheran, sehingga kontrol Iran dianggap melemah.

Persepsi Netanyahu terhadap ancaman adalah dengan melihat lawan sebagai musuh eksistensial dengan niat meniadakan Israel, sehingga strategi keamanannya, mulai dari operasi militer hingga diplomasi koalisi, dibentuk oleh interpretasinya yang subjektif terhadap niat dan kapabilitas musuh. Semua langkah tersebut didukung oleh sumber-sumber intelektual dan kebijakan. Lembaga seperti CSIS (Center for Strategic and International Studies) mencatat eskalasi dua-front dengan Hizbullah serta kebutuhan “pergeseran strategi” Israel melawan Iran dan sekutunya, sedangkan media internasional dan pusat pemikir (Reuters, Politico, Haaretz) melaporkan pernyataan Netanyahu tentang poros perlawanan dan perlunya tindakan keras terhadap Hamas, Hizbullah, Houthi.

Narasi ini menunjukkan bahwa serangan 7 Oktober 2023 menegaskan persepsi ancaman Israel, atau lebih tepatnya Benjamin Netanyahu di Timur Tengah, mendorong kebijakan militer Israel yang lebih agresif dan responsif. Sejarah panjang Israel di Timur Tengah yang senantiasa diwarnai oleh kewaspadaan terhadap ancaman eksternal, baik dari negara-negara Arab maupun aktor non-negara. Memasuki periode pasca 7 Oktober 2023, eskalasi konflik dengan Hamas diperparah oleh meningkatnya ketegangan dengan Iran dan sekutunya, menciptakan perubahan signifikan dalam struktur eksternal yang dihadapi Israel. Perubahan ini bukan hanya membentuk opini

publik domestik mengenai urgensi penguatan strategi keamanan, tetapi juga memengaruhi kalkulasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam membaca posisi relatif Israel di kawasan.

Dalam persepsi elite politik Israel, ancaman tersebut dianggap menyentuh aspek fundamental dari keberlangsungan negara. Oleh karena itu, Israel merespons dengan memperluas cakupan operasi militer tidak hanya terhadap Hamas, tetapi juga terhadap Hizbullah, Suriah, dan bahkan Iran seperti dalam serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada April 2024 serta serangan terbatas ke fasilitas militer Iran pada Oktober 2024.

3. KESIMPULAN

Intensitas konflik Israel-Hamas pasca serangan 7 Oktober 2023 telah menjadi titik balik penting yang memengaruhi strategi keamanan Israel serta mempertegas dinamika kekuatan di kawasan Timur Tengah. Perang yang bermula dari serangan mendadak Hamas berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, termasuk Iran, Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap Israel tidak lagi bersifat tunggal, melainkan multidimensional, dengan potensi perang multi-front yang semakin nyata.

Dalam kerangka realisme neoklasik, strategi keamanan Israel terbentuk dari interaksi antara perubahan struktur eksternal dengan dinamika internal domestik. Di level eksternal, eskalasi konflik mengganggu tren normalisasi diplomatik Israel dengan negara-negara Arab dan memperbesar peran Iran beserta proksinya sebagai penyeimbang regional. Meski demikian, secara material Israel tetap mempertahankan keunggulan relatifnya melalui

kekuatan militer berteknologi tinggi dan dukungan strategis Amerika Serikat yang menjamin Qualitative Military Edge (QME). Di sisi lain, di level internal, opini publik Israel percaya terhadap strategi keamanan IDF dalam menangani ancaman konflik multi-front, mendorong dukungan terhadap kebijakan militer yang keras dan memperkuat legitimasi Netanyahu untuk melanjutkan strategi ofensif..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 merubah sikap Israel untuk menempuh kebijakan militer yang lebih agresif, dikarenakan pengaruh faktor eksternal yaitu tekanan di lingkungan regional akibat dari gerakan poros perlawanan serta perhitungan kekuatan realtif Israel di kawasan. Selain itu juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu opini publik Israel terhadap ancaman perang multi-fron di kawasan. faktor-faktor tersebut kemudian dimediasi oleh persepsi Benyamin Netanyahu sebagai ancaman sehingga perlu untuk melakukan perubahan dalam strategi keamanan Israel di kawasan Timur Tengah.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Ihsan, Muhammad. "Decision Making Process dalam Kebijakan Israel (Studi Kasus Penolakan Israel Terhadap Resolusi DK PBB 2334)." *Journal of Islamic World and Politics* 3.1 (2019).

Abdullayev, Hasan Parvizogly. "Between Peace and Conflict: The Middle East After the Abraham Accords." *Vestnik RUDN. International Relations* 24.1 (2024): 40–50.

Amir, Merav. "Unfastening Israel's Future from the Occupation: Israeli Plans for Partial Annexation of West Bank Territory." *Antipode* 55.5 (2023): 1496–1516.

Anonymous. "Prelude to Operation Cast Lead Israel's Unilateral Disengagement to the Eve of War." *Journal of Palestine Studies* 38.3 (2009): 139–168.

Anthony Pfaff, C. "Avoiding the escalatory trap: Managing escalation during the Israel-Hamas war." *Parameters* 54.3 (2024): 17–26.

Black, Ian. "Just Below The Surface Israel, The Arab Gulf States And The Limits of Cooperation." *Middle East Centre* (2019): 5–37.

Bordas, Maria. " Hamas-Israel War: A Brief Analysis of First Two Phases of War." *European Scientific Journal, ESJ* 20.11 (2024): 1.

Bösch, Richard. "Conflict Escalation." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press, 20 Nov 2017.

Byman, Daniel. "A War They Both Are Losing: Israel, Hamas and the Plight of Gaza." *Survival* 66.3 (2024): 61–78.

Cingöz, Murat. "Iran's Palestinian Policy after Hamas' 7 October Attack." *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 14.2 (2025): 862–874.

Derajat, Anna Zakiah, dan Toni Kurniawan. "Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 18.2 (2022): 133–149.

El Kurd, Dana. "The Paradox of Peace: The Impact of Normalization with Israel on the Arab World." *Global Studies Quarterly* 3.3 (2023): 1–11.

Faheema, Nazhath. "Shifting Politics Between Muslim States & Israel: From the Khartoum Declaration to the Abraham Accords." *Muslim Politics Review* 2.2 (2023): 163–207.

Guzansky, Yoel. "The United Arab Emirates: Proactive in War and Peace." *INSS Insights* 1370.137 (2020).

Guzansky, Yoel, dan Zachary A. Marshall. "The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications." *Israel Journal of Foreign Affairs* 14.3 (2020): 379–389.

Ibrahim Saqir Al-Zaeem, Mohd Roslan Mohd Nor, dan Ainul Asyraf Lokman. "The Israeli Blockade on Gaza: Its Effects and Future." *Journal of Al-Muqaddimah* 8.1 (2020): 48–62.

Izza, Atina. *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel Masa Pemerintahan Ariel Sharon dalam Intifada Kedua*. Surabaya, 2014.

Lupovici, Amir. "Israeli Deterrence and the October 7 Attack." *INSS Strategic Assessment* 27.1 (2024): 60–80.

Makalesi, Araştırma et al. "Analysis of the Dynamics of the Trade Corridors, the Conflict Between Gaza and Israel and the Role of Turkey as an Alternative Route in the Contemporary World." *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies* 36.9 (2023)

Mustofa, Ahmad Zainal. "Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2.2 (2022).

Nabulsi, Jamal. "‘to stop the earthquake’: Palestine and the Settler Colonial Logic of Fragmentation." *Antipode* 56.1 (2024): 187–205.

Nurjannah, Emilia Palupi, dan M Fakhruddin. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina." *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1.1 (2019).

Rose, Gideon. "Neoclassical realism and theories of foreign policy." *World Politics* 51.1 (1998): 144–172.

Rynhold, Jonathan, dan Dov Waxman. "Ideological Change and Israel's Disengagement from Gaza." *Political Science Quarterly* 123.1 (2008): 11–37.

Salameh, Mohammed Torki Bani, dan Ahmad Ishakat. "Understanding Israel's Foreign Policy from the Perspective of Identity and Security." *Insight Turkey* 24.2 (2022): 181–201.

Sari, Dyah Lupita. "Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War." *Global: Jurnal Politik Internasional* 20.1 (2018): 70.

Shemer-Kunz, Yoav. "Annexation, normalization and the two-state solution in Israel-Palestine." *Frontiers in Political Science* 5 (2023).

Soltaninejad, Mohammad. "Coalition-Building in Iran's Foreign Policy: Understanding the 'Axis of Resistance.'" *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 21.6 (2019): 716–731.

Suhayatmi, Alia Rahmatulummah, dan Sekar Anugrah Resky. "Eskalasi Konflik Iran-Israel di Damaskus: Implikasi terhadap Stabilitas Keamanan Regional dan Global." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 9.1 (2024): 49–68.

T Abumbe, Gabriel, Alagh Terhile, dan Dede Chinyere Helen. " Hamas-Israel Conflicts In Gaza And Its Implications For Middle East Stability." *Global Journal of Social Sciences* 23.1 (2024): 157–178.

Wastnidge, Edward, dan Simon Mabon. "The resistance axis and regional order in the Middle East: nomos, space, and normative alternatives." *British Journal of Middle Eastern Studies* 51.5 (2024): 954–971.